

## ABSTRAK

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul menjadi tanggapan serius pemerintah daerah dalam mengelolanya sehingga dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya Kabupaten Gunungkidul. Hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul, serta faktor-faktor apa yang menghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, karena penelitian ini berdasarkan pada hukum sebagai interaksi sosial dengan subyek penelitian adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Bina Pendapatan serta Staff Penetapan dan Bina Pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul. Data yang diperoleh adalah dengan cara penelitian langsung di lapangan yang dilakukan cara wawancara serta menulis ulang data-data lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis berdasarkan pada literatur serta Peraturan Perundang-undangan terkait. Hasil dari penelitian ini adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul, upaya tersebut tergolong berhasil walaupun di beberapa sektor dari Pendapatan Asli Daerah kurang optimal tetapi jumlah realisasi dari Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul selalu meningkat dari tahun 2015 sampai 2017. Sedangkan hal yang menjadi hambatan terbesar dalam pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul yaitu kesadaran dari wajib pajak itu sendiri.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah